

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki potensi yang luar biasa, baik dari segi kultur, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Indonesia memiliki berbagai kekayaan yang berpotensi tinggi untuk berkembang di era ekonomi digital. Salah satu faktor yang dapat mendukung perkembangan tersebut adalah pemanfaatan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Indonesia. Bahkan, menurut data Pricewaterhouse Cooper (PwC) pada Agustus 2017, Indonesia diprediksi akan menjadi satu dari lima negara dengan kekuatan ekonomi terbesar pada 2030 (Cooper, 2017). Salah satu pemanfaatan potensi sumber daya manusia dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi, kreativitas dan inovasi dalam kegiatan wirausaha. Pemanfaatan ini dapat diterapkan pada para pelaku wirausaha yang menggunakan kemajuan teknologi dalam proses bisnisnya, yaitu dengan penggunaan aplikasi akuntansi dalam pencatatan keuangannya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kegiatan wirausaha yang banyak dilakukan di Indonesia karena dalam mendirikan usaha ini mudah dan tidak memerlukan modal yang besar. Kehadiran UMKM membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja sekaligus dapat mengurangi angka pengangguran yang ada serta berkontribusi terhadap perekonomian di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik untuk tahun 2017 menunjukkan bahwa UMKM mampu menyerap sebesar 97% tenaga kerja dan berkontribusi sebesar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (UKM Indonesia, 2019). Pelaku UMKM yang mampu berkreasi dan berinovasi akan

dapat mengurangi kesenjangan sosial melalui peningkatan laba usahanya. Banyaknya UMKM yang menyebar di berbagai tempat di Indonesia akan mampu menciptakan pemerataan ekonomi Indonesia.

UMKM memberikan kontribusi dalam perekonomian nasional, hal ini didukung oleh berbagai elemen yang ada seperti Pemerintah dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Peran pemerintah sangat penting dalam mendukung perkembangan UMKM. UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Republik Indonesia, 2008). UMKM di Indonesia berada pada naungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Kementerian ini memiliki tiga program prioritas yang dijalankan, antara lain pemberdayaan UMKM melalui gerakan kewirausahaan nasional, program untuk perkembangan koperasi dan UMKM serta akses pembiayaan untuk koperasi dan UMKM (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2015).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) juga berperan penting dalam mendukung perkembangan UMKM yaitu dengan menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan mulai tanggal 1 Januari 2018. SAK EMKM merupakan standar akuntansi yang jauh lebih sederhana jika dibandingkan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK EMKM diperuntukkan bagi UMKM yang memenuhi definisi dan karakteristik sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016c).

Seiring berkembangnya teknologi informasi berdampak signifikan terhadap proses pencatatan akuntansi dalam suatu perusahaan. Dampak yang secara

nyata yang dapat dirasakan ialah pemrosesan data yang mengalami perubahan mulai dari sistem manual ke sistem komputer. Berbagai perangkat lunak akuntansi sudah banyak dikembangkan oleh beberapa ahli untuk membantu kegiatan operasional perusahaan (Karte, 2017). Bahkan saat ini perangkat lunak (*software*) akuntansi tidak hanya digunakan di komputer, tetapi juga digunakan di *smartphone*. Penggunaan *smartphone* mudah dan dapat digunakan disegala situasi dan tempat, menjadikan *smartphone* menjadi salah satu perangkat yang dipilih pemilik perusahaan saat ini untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan seperti pencatatan dan pembukuan akuntansi (Elvira, 2018).

Saat ini *smartphone* sudah banyak digunakan oleh semua kalangan, termasuk pelaku bisnis. *Smartphone* yang paling banyak digunakan yaitu *smartphone* berbasis android yang mempunyai banyak fitur untuk memudahkan para pengguna. Fitur tersebut dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk memudahkan dalam hal mengelola keuangan perusahaan. Adanya kemajuan teknologi informasi ini, Kementerian Koperasi dan UMKM bersinergi dengan IAI meluncurkan aplikasi Lamikro (Laporan Akuntansi Usaha Mikro) pada Oktober 2017. Sistem aplikasi Lamikro ini sudah sesuai dengan SAK EMKM. Adanya aplikasi Lamikro sesuai SAK EMKM diharapkan dapat membantu pelaku UMKM di Indonesia dalam penyusunan laporan keuangan.

UMKM masih memiliki kendala dalam perkembangannya untuk pembangunan perekonomian nasional. Kurangnya pemahaman dan pengalaman pelaku UMKM dalam menggunakan teknologi digital dan kebanyakan pelaku usaha mikro masih terkendala dalam hal permodalan (Suwarni, Sedyastuti, & Mirza, 2019). Kendala-kendala ini dapat menyebabkan tidak lancarnya operasional perusahaan dan berujung pada kegagalan usaha. Maka dari itu,

pelaku UMKM perlu mengetahui tentang penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan juga menguasai teknologi yang berkembang saat ini untuk menunjang perkembangan UMKM.

Pemerintah Indonesia juga mendorong perkembangan UMKM dengan baik, yaitu dengan adanya asosiasi IKM (Industri Kecil dan Menengah) di berbagai daerah di Indonesia. Adanya asosiasi ini, banyak pelaku usaha yang difasilitasi pemerintah melalui Kementerian Perindustrian untuk mengembangkan usahanya. Kementerian Perindustrian telah berhasil membina 1.993 Sentra IKM dan telah membina sebanyak 12.687 calon wirausaha baru pada periode 2015-2016. Baru-baru ini, Kementerian Perindustrian telah memfasilitasi IKM dengan restrukturisasi mesin dan peralatan yaitu dengan pemberian potongan harga pembelian mesin/peralatan untuk meminimalisasi pengeluaran yang dilakukan para pelaku IKM (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2018).

Peneliti telah melakukan studi pendahuluan terhadap lima UMKM yang ada di Lumajang melalui wawancara pada Fitria Food (produksi makanan), Arshop (baju dan tas), Regginang Bu Yun (produksi rengginang), Bu Laila (baju dan peralatan makan), dan Sari Wedang (Wedang Nusantara), semua UMKM ini menyatakan bahwa hanya melakukan pencatatan secara sederhana atau semampu mereka dan belum mengetahui tentang SAK EMKM maupun Lamikro. Penelitian yang dilakukan oleh (Warsadi, Herawati, & Julianto, 2017) menunjukkan bahwa pencatatan yang dilakukan UMKM masih sangat sederhana dan masih menggunakan cara manual. Penelitian lain dilakukan oleh (Kirowati, Dewi & Amir, 2019) menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum mengimplementasikan SAK EMKM dalam menyusun laporan keuangan dengan bantuan aplikasi Lamikro.

Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih belum banyak memahami bahkan mengetahui penerapan pelaporan keuangan sesuai SAK EMKM dengan bantuan aplikasi Lamikro. Data menurut The Indonesian Institute, 2017 menunjukkan bahwa sektor industri menempati posisi pertama dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Industri makanan dan minuman merupakan salah satu industri yang berkontribusi tinggi dalam pembentukan PDB (The Indonesian Institut, 2017). Ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

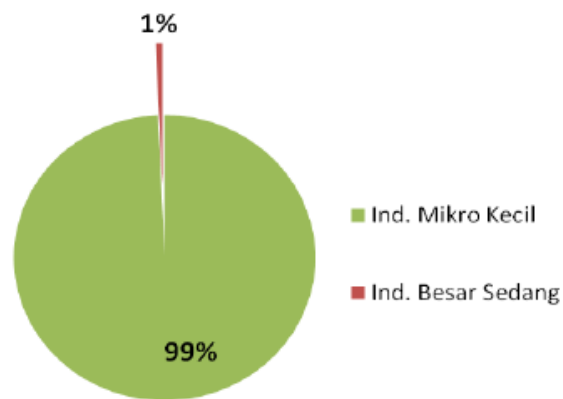
Tabel 1.1
Distribusi PDB Tahunan Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)

LAPANGAN USAHA	Tahun				
	2000	2004	2008	2012	2016*
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	15.6	14.3	14.5	14.5	13.5
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	12.1	8.9	10.9	11.8	7.2
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	27.7	28.1	27.8	24.0	20.5
a. Industri Migas	3.9	4.1	4.8	3.1	2.3
b. Industri tanpa Migas	23.8	24.0	23.0	20.9	18.2
1). Makanan, Minuman dan Tembakau	8.1	7.1	7.0	7.6	6.9
2). Pupuk, Kimia & Barang dari karet	3.1	2.8	3.1	2.6	2.4
3). Alat Angk., Mesin & Peralatannya	4.9	6.4	6.7	5.7	2.2
4). Lainnya	7.8	7.7	6.2	5.0	7.6
4. LAINNYA	44.6	48.7	46.8	49.7	58.9
INDONESIA	100	100	100	100	100

Sumber: The Indonesian Institute, 2017

Gambar 2.1

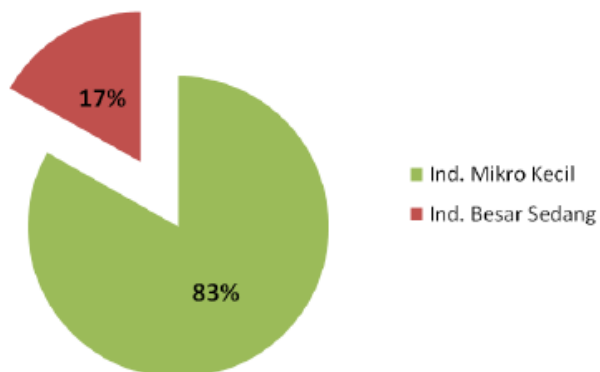
**Proporsi Perbandingan Jumlah Usaha Industri Makanan dan Minuman
antara Mikro Kecil dengan Besar Sedang**



Sumber: The Indonesian Institute, 2017

Gambar 2.2

**Proporsi Perbandingan Tenaga Kerja Indonesia Makanan dan Minuman
antara Industri Mikro Kecil dengan Besar Sedang**



Sumber: The Indonesian Institute, 2017

Kedua gambar diatas menunjukkan besarnya presentase industri mikro kecil, jika dibandingkan dengan industri besar sedang dilihat dari segi jumlah usaha

dan tenaga kerja. Penelitian ini difokuskan pada UMKM di bidang makanan dan minuman yang memiliki kontribusi yang cukup tinggi terhadap PDB, khususnya pada pengusaha minuman.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur Mochammad Ardi Prasetyawan mengatakan, Jawa timur yang memiliki lahan pertanian yang cukup besar merupakan salah satu penyebab UMKM di Jawa Timur melakukan pengelolaan terhadap makanan dan minuman (Jatim Fair, 2017). Data menurut Statistik Pertanian, 2018 menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki luas kebun paling tinggi dari tahun 2013-2017 (Statistik Pertanian, 2018). Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.3

Luas Kebun Menurut Provinsi Tahun 2013-2017

No.	Provinsi/ Province	Tahun/ Year					Pertumbuhan/ Growth 2017 over 2016 (%)
		2013	2014	2015	2016	2017 ¹⁾	
1	Aceh	380.708	342.031	359.661	399.137	402.647	0,88
2	Sumatera Utara	564.480	547.717	593.174	598.239	691.622	15,61
3	Sumatera Barat	347.254	348.886	350.576	343.276	345.545	0,66
4	Riau	544.077	432.144	451.139	490.249	498.476	1,68
5	Jambi	373.741	399.817	359.474	376.368	456.293	21,24
6	Sumatera Selatan	410.381	376.632	377.243	364.583	367.521	0,81
7	Bengkulu	188.860	197.514	173.311	173.172	173.588	0,24
8	Lampung	743.725	757.023	749.097	746.183	702.426	-5,86
9	Kepulauan Bangka Belitung	122.777	109.820	125.570	117.371	99.037	-15,62
10	Kepulauan Riau	42.618	40.740	38.554	34.317	36.334	5,88
11	DKI Jakarta	1.004	932	955	497	924	85,81
12	Jawa Barat	556.658	568.685	596.917	589.170	553.671	-6,03
13	Jawa Tengah	736.622	732.266	712.111	699.044	707.199	1,17
14	DI Yogyakarta	104.838	104.555	103.786	103.697	103.112	-0,56
15	Jawa Timur	1.141.452	1.131.743	1.112.267	1.103.984	1.115.801	1,07
16	Banten	165.558	171.801	157.546	149.925	127.032	-15,27
17	Bali	123.741	123.771	124.289	124.961	124.071	-0,73
18	Nusa Tenggara Barat	254.898	254.894	245.564	240.016	235.550	-1,86
19	Nusa Tenggara Timur	508.996	542.533	527.397	532.756	534.313	0,29
20	Kalimantan Barat	672.231	693.997	608.531	411.188	571.152	38,90
21	Kalimantan Tengah	586.825	569.235	587.504	597.440	601.742	0,72
22	Kalimantan Selatan	249.748	247.596	237.044	233.149	237.833	2,01
23	Kalimantan Timur	216.534	216.238	200.001	200.558	193.813	-3,36
24	Kalimantan Utara	38.742	35.470	37.753	36.453	35.422	-2,83
25	Sulawesi Utara	206.521	191.616	180.883	246.470	215.401	-12,61
26	Sulawesi Tengah	356.461	405.945	421.017	468.234	398.489	-14,90
27	Sulawesi Selatan	536.218	509.537	526.681	501.918	481.405	-4,09
28	Sulawesi Tenggara	244.046	217.246	213.009	214.175	231.171	7,94
29	Gorontalo	165.344	152.217	151.480	191.939	239.313	24,68
30	Sulawesi Barat	133.070	139.961	137.131	133.687	133.484	-0,15
31	Maluku	790.708	790.702	718.142	433.852	353.358	-18,55
32	Maluku Utara	279.316	279.558	278.060	277.792	278.099	0,11
33	Papua Barat	6.523	6.523	6.523	6.353	25.919	307,98
34	Papua	42.091	394.231	399.287	399.655	459.169	14,89
Indonesia		11.838.770	12.033.776	11.861.676	11.539.826	11.730.930	1,66

Sumber : Badan Pusat Statistik
Source : BPS Statistics Indonesia

Keterangan : * Angka Sementara
Note : * Preliminary Figure

Gambar 2.4

Luas Lahan Pertanian Menurut Kota/kabupaten 2018

Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian			Lahan Bukan Pertanian	Rata-rata
	Sawah		Bukan Sawah		
	Irigasi	Non Irigasi			
PACITAN	140,04	562,90	3 544,95	227,99	4 475,88
PONOROGO	1 046,94	308,62	1 364,77	330,47	3 050,80
TRENGGALEK	334,02	296,87	2 003,73	228,85	2 863,47
TULUNGAGUNG	925,19	322,82	1 463,68	361,99	3 073,69
BLITAR	777,23	229,44	1 778,85	333,05	3 118,57
KEDIRI	1 607,66	276,97	793,15	447,77	3 125,55
MALANG	622,86	166,49	2 897,09	190,20	3 876,65
LUMAJANG	1 162,62	130,76	2 021,86	168,85	3 484,09
JEMBER	1 601,12	75,85	1 067,58	187,26	2 931,82
BANYUWANGI	1 190,24	48,42	1 915,33	199,90	3 353,90
BONDOWOSO	1 475,34	582,55	1 387,26	159,00	3 604,16
SITUBONDO	1 957,67	205,93	1 205,95	180,53	3 550,08
PROBOLINGGO	1 135,01	459,45	1 644,12	135,64	3 374,22
PASURUAN	1 219,89	186,16	1 920,68	149,94	3 476,67
SIDOARJO	2 372,63	10,43	2 808,39	223,60	5 415,06
MOJOKERTO	1 888,04	762,52	823,10	224,63	3 698,28
JOMBANG	1 740,25	516,11	610,65	224,10	3 091,11
NGANJUK	1 708,58	327,85	643,06	318,61	2 998,10
MADIUN	1 634,54	223,69	886,35	301,17	3 045,75
MAGETAN	1 364,76	254,26	925,34	327,88	2 872,24
NGAWI	1 428,57	669,91	985,95	371,91	3 456,33
BOJONEGORO	766,36	2 126,54	1 084,61	288,42	4 265,94
TUBAN	913,66	1 542,63	2 909,84	291,71	5 657,84
LAMONGAN	1 636,38	2 027,67	1 178,15	191,54	5 033,74
GRESIK	410,90	2 460,05	2 039,66	193,38	5 103,99
BANGKALAN	146,36	948,59	617,99	359,06	2 072,00
SAMPANG	13,54	1 443,60	1 132,91	308,57	2 898,62
PAMEKASAN	231,73	1 385,80	1 481,40	312,88	3 411,81
SUMENEP	347,19	1 270,94	1 882,42	221,43	3 721,99
KOTA KEDIRI	1 482,87	286,56	183,47	268,02	2 220,92
KOTA BLITAR	1 015,31	6,18	480,26	305,67	1 807,42
KOTA MALANG	968,75	23,02	1 487,11	165,64	2 644,53
KOTA PROBOLINGGO	896,09	14,51	226,72	137,81	1 275,14
KOTA PASURUAN	2 215,08	61,04	1 155,15	137,91	3 569,17
KOTA MOJOKERTO	1 347,94	211,05	291,13	154,64	2 004,77
KOTA MADIUN	1 079,23	129,54	257,32	223,07	1 689,16
KOTA SURABAYA	47,51	616,96	1 305,75	123,17	2 093,40
KOTA BATU	826,22	161,79	1 598,12	123,15	2 709,28
JAWA TIMUR	1 054,16	655,68	1 568,94	252,49	3 531,26

Sumber: Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas) 2018

Gambar 2.4 Menunjukkan luas lahan pertanian tiap kota/ kabupaten. Lumajang merupakan kabupaten yang memiliki lahan pertanian yang luas, khususnya pada lahan bukan sawah (Badan Pusat Statistik, 2018).. Salah satu

produk pertanian dari tanaman biofarmaka kelompok rimpang yaitu jahe. jahe memiliki luas panen paling tinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 10.205,03 hektar (Badan Pusat Statistik, 2018). Sehingga penelitian difokuskan pada UMKM yang melakukan pengelolaan pada tanaman jahe yaitu UMKM Sari Wedang Lumajang.

Studi pendahuluan telah dilakukan oleh peneliti kepada Manajer UMKM Sari Wedang Lumajang, yakni Ibu Roselly. UMKM Sari Wedang Lumajang ini merupakan peraih terbaik P-IRT (Produk Industri Rumah Tangga) hari Kesehatan Nasional se-Kabupaten Lumajang dan merupakan anggota IKM di Lumajang. Ibu Roselly mengatakan bahwa pencatatan yang diterapkan dalam keseharian UMKM ini masih sederhana yaitu hanya sebatas pencatatan kas masuk dan kas keluar dan belum adanya pemisahan yang jelas antara aset yang dimiliki UMKM dengan aset yang dimiliki pribadi. Ibu Roselly juga belum mengetahui adanya SAK EMKM yang diterbitkan IAI dan aplikasi Lamikro yang diluncurkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM yang bersinergi dengan IAI. Berdasarkan fakta ini muncul masalah pada pencatatan keuangan UMKM Sari Wedang Lumajang terhadap standar pencatatan keuangan yang seharusnya diterapkan yaitu SAK EMKM. Oleh sebab itu, peneliti memilih UMKM Sari Wedang Lumajang sebagai objek dalam studi kasus pada penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Aplikasi Lamikro di Era Ekonomi Digital pada UMKM Sari Wedang Lumajang”**.

1.2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Bagaimana penerapan pelaporan keuangan pada UMKM Sari Wedang Lumajang?

1.3. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

Mengetahui penerapan pelaporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dengan menggunakan aplikasi Laporan Akuntansi Usaha Mikro (Lamikro) di era ekonomi digital pada UMKM Sari Wedang Lumajang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan umumnya dibidang akuntansi dan khususnya tentang penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dengan menggunakan aplikasi Laporan Akuntansi Usaha Mikro (Lamikro) bagi pembaca dan penelitian selanjutnya.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan bagi peneliti tentang penerapan Standar

Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dengan menggunakan aplikasi Laporan Akuntansi Usaha Mikro (Lamikro).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi entitas, yaitu UMKM Sari Wedang Jahe Lumajang sebagai bahan masukan dalam penerapan pencatatan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dengan menggunakan aplikasi Laporan Akuntansi Usaha Mikro (Lamikro).